

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang sampai sekarang ini masih menyuarkan dan melakukan privatisasi ekonomi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri dan sekaligus mengurangi krisis ekonomi yang pernah terjadi ketika tahun 1998-1999. Dalam konteks hubungan antar negara, Privatisasi BUMN di Indonesia dilakukan melalui hukum lewat Rancangan Undang-undang yang diusulkan oleh lembaga donor internasional seperti IMF dengan *letter of Intent*-nya sendiri. Privatisasi di Indonesia terutama BUMN berawal dari program pembinaan BUMN yang gagal total serta rasio keuntungan BUMN yang sangat rendah akhir-akhir ini.

Kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi berdampak pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, antara lain BBM, TDL, TDT dan tentu masih banyak lagi yang lainnya. Demikian pula dengan kebijakan privatisasi pada beberapa BUMN yang nyata-nyata melanggar mandat UUD 1945 pasal 33 (ayat 2) dan UU Propenas No.25 tahun 2000. Kedua kebijakan yang diambil secara bersamaan tersebut dilakukan dengan alasan untuk menutupi defisit anggaran sejak digulirkanya APBN 2003.

Mencemati sejumlah kebijakan pemerintah tersebut, tampak nyata bahwa kebijakan pemerintah saat ini mengikuti agenda kreditor internasional (donor) yang diwakili oleh IMF dan CGI, serta berbagai jenis perusahaan transnasional yang rajin membonceng kebijakan tersebut. Pengurangan subsidi bagi rakyat,

agenda privatisasi, serta penjualan aset BPPN dalam waktu singkat yang menjadi prasyarat yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI) IMF merupakan contoh nyata agenda ini.

Berakhirnya PD II yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet menjadi negara-negara satelit dan maraknya perlawanan beberapa negara berkembang menentang kolonialisme. Bentuk kolonialisme tidak bersifat fisik lagi, tetapi diakibatkan sebuah dominasi sistem dan struktur dunia yang tidak adil. Pertemuan para ekonom liberal dengan dua lembaga donor (IMF dan Bank Dunia) beserta pemerintah Amerika Serikat (diwakili oleh Menteri Keuangan) di Kota Washington. Menghasilkan "*Washington Consensus*" yang terdiri sepuluh kesepakatan, agar disarankan untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut bagi negara-negara yang terkena krisis. Isi perjanjian atau konsensus adalah *fiscal discipline, public expenditure, tax reform, financial liberalization, exchange rates policy, liberalisasi pasar, state enterprise, barriers, intellectual property rights*.¹ Pada intinya konsensus tersebut merupakan program IMF dengan nama *Structural Adjustment Programs* (SAP) yang sangat menguntungkan perusahaan internasional dan negara-negara maju. Karena memposisikan negara berkembang sangat inferior di mata pencatatan politik dunia.

Sejak masa orde baru, Indonesia melakukan reformasi hukum yang bersifat instrumental terhadap perekonomian untuk membuka diri bagi pembangunan kapitalisme yang tertuang dalam Penanaman Modal Asing UU No 1/1967 dan Penanaman Modal Dalam Negeri UU No 8/1968. Oleh karena itu,

¹ Editor I. Wibiwo, Francis Wahono, *Neoliberalisme*, Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, hal. 119

mereka menentang bentuk-bentuk proteksionisme, anti subsidi dan mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi. Agar negara-negara berkembang dapat memperoleh keuntungan terbesar dari pergerakan ekonomi dunia yang kompetitif, maka mereka harus membuka aksesnya ke pasar dunia. Anggapan ini menurut pandangan kaum neolib akan membuat perekonomian Indonesia bekerja secara efektif dan efisien. Namun faktanya, Indonesia terjat dalam hutang yang melambung tinggi ditambah lagi dengan proses hegemoni negara maju dalam setiap pengambilan keputusan di lembaga-lembaga donor di atas (IMF, WTO, World Bank). Seperti ditunjukkan oleh Gilpin²,

“Bahwa seiring dengan proses globalisasi situasi juga di ikuti oleh semakin luasnya ketidakmerataan distribusi pendapatan di antara negara bangsa, tingkat pengangguran yang semakin luas, deregulasi lingkungan, dan akibat-akibat merusak dari globalisasi, yakni kehancuran ekonomi banyak negara akibat tidak adanya regulasi aliran modal global”.

Hal ini dapat dilihat dengan kehadiran neoliberalisme di negara-negara berkembang seperti di Thailand, Indonesia, Filipina, beberapa negara Amerika Latin seperti Brazil dan Argentina adalah contoh-contoh negara yang dimaksud Oleh Gilpin. Walaupun Gilpin tidak memberikan penjelasan secara komprehensif tentang akar permasalahan di Indonesia. Tetapi pada dasarnya negara berkembang mengalami dampak sama terhadap arus globalisasi pada akhir abad ini. Kemiskinan, pengangguran yang terjadi di beberapa negara berkembang bukanlah faktor alami, tetapi lebih diakibatkan oleh struktur dunia yang tidak adil. Kenyataannya Indonesia mengalami arus globalisasi yang cukup besar,

² Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru*, Tajidu Press, Yogyakarta, 2004, hal. 20

dengan hadirnya arus modal international, pengurangan tarif impor dalam berbagai sektor dan beberapa aturan yang membuka pasar bebas.

Berangkat dari abstraksi diatas, kemudian memantik penulis untuk menjadikan "DAMPAK NEOLIBERALISME TERHADAP PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA ERA REFORMASI" sebagai judul skripsi.

B. Tujuan Penulisan

- a. Membangun pemahaman posisi hubungan Indonesia dalam kanca perpolitikan global.
- b. Menganalisa sejauh mana peran neoliberalisme dalam mendorong privatisasi sektor publik di Indonesia.
- c. Membangun pemahaman bahwa Privatisasi BUMN adalah perwujudan dari hilangnya tanggung jawab negara dalam sektor Publik.
- d. Selain sebagai prasyarat kelulusan, mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi cakrawala keilmuan.

C. Latar Belakang

Gagasan neo-liberal adalah berbeda dengan konsep liberalisme klasik abad 18-19. Neoliberalisme memasukkan berbagai kritik yang dilancarkan oleh Sosialisme dan Liberalisme klasik. Disebut neoliberalisme karena berbeda dengan liberalisme klasik, yang berarti neo adalah "baru", atau merupakan antitesa terhadap liberalisme klasik. Ada berbagai hal yang dapat kita petik beberapa gagasan neoliberalisme yang berbeda dengan liberalisme³:

³ Ibid, hal. 49

Pertama, dasar pemikiran neoliberal (ordo liberal) adalah gagasan anti naturalistik tentang pasar dan kompetisi. Artinya pasar (*market*) bukanlah gejala alami seperti gempa bumi atau musim semi, dengan hukum-hukum alaminya yang berlaku juga seandainya tidak ada manusia. Pasar adalah salah satu dari berbagai model hubungan sosial bentukan manusia, yang karenanya bisa diciptakan dan dibatalkan menurut desain manusia.

Kedua, neoliberalisme menolak konsepsi sejarah yang mengasalkan perubahan sosial hanya pada proses-proses perubahan ekonomi kapitalis, seperti yang terdapat dalam dua ideologi besar kapitalisme dan sosialisme. Bahwa, bagi kaum neoliberalis sejarah kapitalisme adalah sejarah institusional ekonomi. Antara ekonomi dan infrastruktur sosial terjadi hubungan sebab akibat yang timbal balik.

Ketiga, bagi kaum neoliberalis bahwa kinerja kapitalisme tidak seharusnya di asalkan pada logika modal (*capital*), karena transaksi ekonomi hanyalah salah satu bentuk dari relasi sosial. Oleh sebab itu, disitulah letak pentingnya berbagai kebijakan sistem kesejahteraan (*welfare system*).

Keempat, yaitu neoliberalisme selalu menciptakan etos kewirausahaan dalam masyarakat. Jika dalam liberalisme klasik kebijakan sosial yang minimal dianggap Sebagai bekerjanya ekonomi, tetapi bagi kaum neoliberalis bahwa kebijakan-kebijakan sosial itu merupakan persyaratan mutlak bagi bekerjanya ekonomi yang adil dan kompetitif serta terciptanya berbagai bentuk kewirausahaan di dalam masyarakat.

Kelima, tidak seperti liberalisme klasik, bagi kaum neo-liberalis melihat persoalan tidak terletak pada bagaimana menciptakan kebebasan ekonomi pasar

dalam kontak tata-negara yang ada, melainkan bagaimana menciptakan tata-negara yang menjamin kebebasan ekonomi. Sebagaimana telah dipaparkan diatas tentang beberapa prinsip-prinsip neoliberalisme merupakan antitesa terhadap liberalisme klasik dan sosialisme, maka ada beberapa elemen yang mendorong pesatnya ideologi neo-liberalisme sebagai berikut :

Pertama, munculnya perusahaan multinasional (*Multinational Corporation*) sebagai kekuatan yang nyata dan bahkan memiliki aset kekayaan yang lebih besar dari pada negara-negara kecil di dunia. Seperti Exxon Mobile, Freeport, Mc Donald, Coca-Cola, Telecom Service, HSBC dan sebagainya.

Kedua, munculnya organisasi atau rezim international yang berfungsi sebagai *surveillance system*. Yaitu untuk menjamin negara-negara di seluruh dunia untuk patuh menjalankan prinsip-prinsip pasar bebas dan perdagangan bebas. Ini bisa dilihat dengan keberadaan WTO (World Trade Organization) yang dapat menjatuhkan hukuman pada negara-negara yang tidak patuh pada perdagangan bebas. Dan juga sebagai partnernya yaitu IMF dan World Bank.

Ketiga, yaitu sebagai variabel independent dari semua ini adalah dengan adanya revolusi di bidang teknologi dan transportasi⁴. Teknologi informasi dan transportasi adalah sangat menguntungkan bagi pihak kapitalis karena dengan keberadaannya para pelaku bisnis tidak lagi mengalami hambatan apapun untuk menggerakkan barang atau modal di manapun mereka mau.

Gagasan neoliberalisme tidak lain adalah bentuk penjajahan baru (*neokolonialisme*) terhadap negara-negara berkembang melalui kebijakan negara

⁴ Ibid, hal. 4-5

yang mendukung perdagangan bebas. Sehingga melepaskan negara pada fungsinya sebagai institusi tertinggi yang bertanggung jawab atas sektor-sektor publik seperti, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan untuk rakyatnya. Semua sektor publik tersebut digantikan pada "*pasar*", bahkan dalam pandangan neoliberalis; negara mempunyai peran sebagai alat untuk melindungi terhadap berlangsungnya pasar bebas melalui kebijakan-kebijakan negara yang memudahkan masuknya modal asing dan mendukung perdagangan bebas. Menurut logika neoliberal, ekonomi suatu negara akan berkembang bila ada kebebasan pasar (*Laisses faire*). Liberalisasi ini berarti kebebasan yang seluas-luasnya bagi kapitalis untuk mengeruk keuntungan. Penerapan kepercayaan tersebut berupa pemberian ruang yang bebas dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional dan investasi seperti dengan adanya: AFTA, NAFTA, maupun dalam bentuk kawasan pertumbuhan yang lebih kecil seperti SIJORI, Otorita Batam, yang merupakan area bebas dari birokrasi negara, dimana peran-peran negara tersebut diambil alih oleh lembaga-lembaga supranegara seperti IMF, WORLD BANK, WTO, dan TNC.

Era awal Orde Baru sebagai bukti pemerintah Indonesia untuk membuka pasar bebas dan investasi besar-besaran melalui UUPMA No 1 Th 1967 sebagai awal proyek kaum neo-liberalis untuk menancapkan dominasi di Indonesia. Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia terkait erat dengan proyek neoliberalisme melalui bentuk REPELITA yang lebih mendewakan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi semata-mata hanya memposisikan manusia sebagai robot-robot yang hanya mampu mengejar keuntungan semata. Setiap lima tahun

yang dicanangkan mempunyai visi dan orientasi yang berbeda-beda. Salah satu persoalannya ialah karena pembangunan dalam Pelita tidak memperhatikan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Pemanfaatannya pun bersifat eksploitatif dan merusak, sehingga terkesan bahwa pembangunan dalam sebuah Pelita dirasa tidak lagi perlu mempertimbangkan kepentingan pembangunan dimasa depan atau jangka panjang.

Hal tersebut diatas sejalan dengan yang di kemukakan oleh, Secretary of the Treasury Amerika Serikat, James Baker pada tahun 1985, yaitu Structural Adjustment Program (SAP). Kebijakan ini berbasiskan apa yang disebut dengan Washington Consensus. Berdasarkan kebijakana baru ini, Negara-negara yang ingin mendapatkan utang dari IMF dan Bank Dunia harus berkomitmen untuk melakukan re-strukturisasi atau perubahan dalam kebijakan ekonomi makro mereka, yang berarah pada ekonomi yang berorientasi ekspor (export-led growth), mengurangi peranan Negara dalam ekonomi, dan privatisasi sector-sektor publik.⁵

Kepercayaan yang melandasi kebijakan ini adalah bahwa “peranan Negara dalam ekonomi harus dikurangi, dan keterbukaan ekonomi untuk dunia luar adalah komponen penting dari konsensus neo-liberal; pemerintah harus mengurangi atau menghapus semua aturan, privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan Negara atau publik dan beralih dari Industrialisasi Subtitusi Impor menuju ke strategi yang berorientasi kepada ekspor”⁶. Dalam konteks yang lebih luas, mengharuskan Pemerintah Negara-negara yang memperoleh utang untuk mengurangi pengeluaran pemerintah untuk mengontrol inflasi; melakukan liberalisasi terhadap

⁵ Robert Gilpin. (2001). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton and Oxford: Princeton University Press. p. 314

⁶ Ibid, p. 315

impor dan menghapus semua hambatan-hambatan bagi investasi asing; privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Negara; mengurangi nilai mata uang dan mengurangi atau menghapus semua peraturan yang melindungi buruh lokal⁷.

Selain itu, peranan IMF dan Bank Dunia ditingkatkan dalam manajemen utang luar negeri, dengan menjadi agen penting dalam pembangunan; dan juga memformulasikan kebijakan ekonomi pemerintah di Negara-negara berkembang yang memperoleh pinjaman dari IMF atau Bank Dunia; semua peranan yang diakui belum dimainkan oleh IMF sebelumnya⁸. Hingga akhir tahun 1970-an, sekitar 70 negara berkembang yang telah mengikuti nasehat Bank Dunia dan IMF. Seperti yang diakui oleh Bello, selain untuk membayar kembali utang luar negeri kepada Negara-negara utara, menghancurkan sistem ekonomi yang berbasiskan pada peran Negara, juga adalah tujuh strategis dari doktrin ini⁹.

Program restrukturisasi ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap hubungan antara Negara-negara berkembang dan Negara-negara industry maju. Program ini dirancang khusus untuk tujuan spesifik; diantaranya untuk memastikan bahwa negara-negara peminjam akan mengembalikan utang; untuk meningkatkan aliran barang dari Selatan ke Utara; dan meningkatkan kontrol terhadap pasar di negara-negara Selatan untuk produk-produk dari Utara¹⁰. Secara singkat, Pablo Davalos menguraikan program Structural Adjustment sebagai

⁷ Walden Belo (2001). "Building an Iron Cage: The Bretton Woods Institutions, the WTO, and the South." In Sarah Anderson (Ed.). *Views from the South: The Effects of Globalization and the WTO on Third World Countries*. Chicago: Food First Books & The International Forum on Globalization. p. 66

⁸ Robert K. Schaeffer (2005). *Understanding Globalization: The Social Consequences of Political, Economic and Environmental Changes*. Maryland: Rowman & Little Field Publishers, Inc. p. 88

⁹ Ibid, p. 92

¹⁰ Ibid, p. 93

“sebuah proses global yang mendefinisikan kekuasaan geopolitis dan pre-eminence capital keuangan;” dimana bertujuan untuk memastikan control, dominasi kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam dan persediaan buruh.” Dengan kata lain, semua program ini dirancang khusus untuk memastikan pengontrolan terhadap ekonomi negara-negara Selatan. Dengan demikian, beberapa kalangan menilai utang luar negeri sebagai tidak lebih dari sebuah bentuk kolonialisme baru paska Perang Dunia Kedua.

Konsekuensi yang ditimbulkan oleh krisis utang luar negeri pada tahun 80-an sangat menyedihkan bagi Negara-negara berkembang. Secara ekonomis, meskipun Negara-negara yang berutang tersebut berusaha untuk membayar kembali utang mereka, justru mereka terjerumus ke dalam siklus utang yang sangat menyedihkan, sehingga ekonom menguraikan dekade 80 sebagai “lost decade” bagi negara-negara berkembang¹¹. Secara global, utang luar negeri negara-negara berkembang bertambah dari 639 miliar USD ke 1.341 miliar USD pada tahun 1990; dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga sekarang ¹² Untuk Amerika Selatan saja, utang mereka bertambah dari 280 miliar USD ke 435 miliar USD pada tahun 1993.

Di Afrika, melalui SAP, negara-negara Afrika dipaksa untuk memotong anggaran untuk kesehatan, pendidikan serta sector pelayanan sosial lainnya; melakukan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik negara, menghapus semua aturan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan

¹¹ Ibid, p. 94

¹² Ibid, p. 95

buruh lokal, serta membuka pasar bagi investasi asing¹³. Dari banyak kajian yang dilakukan, program restrukturisasi yang diimpose oleh Bank Dunia dan IMF, realitas yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan; justru menambah kemiskinan dan kemelaratan rakyat Afrika. Bahkan hal ini sendiri diakui oleh Bank Dunia, bahwa program restrukturisasi tidak banyak membantu Afrika¹⁴. Fenomena yang sama juga berlaku untuk negara-negara di Amerika Latin seperti Argentina, Chile, Meksiko dan Asia seperti Thailand dan Filipina.

Khusus untuk kawasan Asia, para ekonom sering mengklaim bahwa kebijakan-kebijakan di atas membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Fokusnya sering terarah pada kasus Korea, Singapore, dan Taiwan, serta Thailand, dan Indonesia selama tahun 1980-an hingga 90-an sebelum terjadinya krisis. Khusus untuk kasus Indonesia dan Thailand, meskipun diakui bahwa dilihat dari GDP-nya, terjadi peningkatan dari tahun 1960-an hingga tahun 1990-an, namun pada akar rumput, kebijakan-kebijakan yang datang atas nasehat dari Bank Dunia dan IMF telah menghancurkan pertanian lokal, meningkatkan arus urbanisasi, meningkatkan eksploitasi terhadap buruh lokal, dan memperlebar jurang antara miskin dan kaya. Khusus untuk Thailand, kebijakan-kebijakan di atas menghancurkan pertanian yang sering menjadi sumber kehidupan masyarakat rural. Dampaknya banyak rakyat yang meninggalkan area rural dan pertanian mereka untuk mencari kerja di perkotaan. Dari sejumlah itu, ada yang terjerumus

¹³ Brooke G. Schoepf, Claude Scoepf & Joyce V. Millen (2000). "Theoretical Therapies, Remote Remedies: SAPs and the Political Ecology of Poverty and Health in Africa." In Jim Yong Kim. Et al (Eds.). *Dying for Growth: Global Inequality and the Health of the Poor*. Monroe; Common Courage Press. p. 99

¹⁴ Ibid, p. 101

ke dalam prostitusi, dan juga ada yang menjadi obyek perdagangan dengan apa yang disebut “Human Trafficking.”

Dalam konteks hubungan antara negara-negara Utara dan Selatan, utang luar negeri juga secara terus menerus memperlebar jurang antara Utara dan Selatan. Contohnya, hingga sekarang, 5% penduduk dunia menguasai 80% sumber ekonomi global sementara yang menyisakan 20% sumber daya ekonomi untuk 95% penduduk dunia. Dengan pengalaman global tersebut, pada saat ini banyak kalangan yang sudah mulai melakukan kampanye global untuk membatalkan semua proses pembayaran kembali terhadap utang luar negeri oleh negara-negara Selatan.

Privatisasi di Indonesia menjadi syarat yang harus dilakukan dan diwujudkan melalui kebijakan negara yang menjadi komprador IMF atas kebijakan yang menjadi pengganti dalam tekanan atau jerat hutang luar negeri terhadap Indonesia sendiri.

Di bawah IMF, Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang-barang pokok dan *public utilities*, peningkatan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset-aset negara dengan memprivatisasi BUMN. Program privatisasi yang sudah dijalankan Orde Baru dilanjutkan lagi dengan memperbanyak jumlah BUMN yang dijual baik di pasar modal maupun kepada investor strategis. Tahun 1998 pemerintah kembali menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada perusahaan asing Cemex. Tahun 1999 pemerintah menjual 9,62% saham PT Telkom, 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong, dan 49% saham PT Pelindo III investor Australia.

Tahun 2001 pemerintah kembali menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Socufindo, 11,9% saham PT Telkom. Antara tahun 2002-2006 privatisasi dilanjutkan dengan menjual saham 14 BUMN dengan cara IPO dan *strategic sales*.

Kebijakan privatisasi pada masa Orde Baru ini dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri (HLN) Indonesia yang jumlahnya terus membengkak. Tahun 1985 HLN pemerintah sudah mencapai US\$ 25,321 milyar. Pada tahun 1991 jumlah HLN pemerintah membengkak dua kali lipat menjadi US\$ 45,725 milyar. Jumlah HLN pemerintah terus bertambah hingga tahun 1995 mencapai US\$ 59,588 milyar. Pemasukan dari hasil privatisasi BUMN tahun 1995-1997 yang digunakan pemerintah untuk membayar HLN dapat menurunkan HLN pemerintah menjadi US\$ 53,865 milyar pada tahun 1997.

Privatisasi adalah pemindahan kepemilikan aset-aset milik negara kepada swasta dan asing. Namun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN mempercantik makna privatisasi dengan menambahkan alasan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham masyarakat. Berdasarkan pengertian privatisasi dalam undang-undang BUMN, visi Kementerian Negara BUMN tentang privatisasi adalah *Mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi champion dalam industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya*. Sementara itu dalam program privatisasi tahun ini alasan yang dikemukakan oleh Sofyan Djalil adalah: *Privatisasi BUMN dilakukan tidak untuk menjual BUMN, melainkan*

untuk memberdayakan BUMN itu sendiri, sehingga akan menjadikan BUMN lebih transparan dan dinamis.

Privatisasi tidak semanis apa yang digambarkan dalam visi Kementerian Negara BUMN seperti pada poin meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. Sekilas masyarakat luas dilibatkan dalam kepemilikan BUMN, padahal kita tahu bahwa yang dimaksud masyarakat bukanlah pengertian masyarakat secara umum, tetapi memiliki makna khusus yaitu investor.

Sebagaimana metode privatisasi BUMN dilakukan dengan IPO dan *strategis sales*, maka yang membeli saham-saham BUMN baik sedikit ataupun banyak adalah investor di pasar modal apabila privatisasi dilakukan dengan cara IPO, dan investor tunggal apabila privatisasi menggunakan metode *strategic sales*. Investor di pasar modal maupun investor tunggal bisa berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Sementara yang dimaksud investor itu sendiri adalah individu yang melakukan investasi. Jadi tidak mungkin privatisasi akan menciptakan kepemilikan masyarakat, sebab kehidupan masyarakat sudah sangat sulit dengan mahalnnya harga-harga barang pokok, pendidikan, dan kesehatan, bagaimana bisa mereka dapat berinvestasi di pasar modal. Apalagi hingga akhir tahun 2007 investor asing menguasai 60% pasar modal Indonesia sehingga memprivatisasi BUMN melalui IPO jatuhnya ke asing juga. Sedangkan investor lokal, mereka ini juga kebanyakan para kapitalis yang hanya mengejar laba, apalagi konglomerat-konglomerat yang dulu membangkrutkan Indonesia sudah banyak yang *comeback*.

Sementara itu, langkah-langkah kebijakan privatisasi di Indonesia selaras dengan sebuah dokumen milik Bank Dunia yang berjudul *Legal Guidelines for Privatization Programs*. Dalam dokumen ini terdapat panduan bagaimana pemerintah melakukan kebijakan privatisasi dengan menghilangkan persoalan hukum. *Pertama*, memastikan tujuan-tujuan pemerintah dan komitmen terhadap privatisasi. *Kedua*, amandemen undang-undang atau peraturan yang merintang privatisasi. *Ketiga*, ciptakan institusi yang memiliki kewenangan dalam implimentasi privatisasi. *Keempat*, hindari kekosongan kewenangan kebijakan privatisasi yang dapat menyebabkan kebijakan privatisasi tidak dapat dijalankan.

Dalam dokumen *USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008* disebutkan bagaimana lembaga bantuan Amerika Serikat ini bersama Bank Dunia aktif terhadap permasalahan privatisasi di Indonesia. Sementara itu ADB dalam *News Release* yang berjudul *Project Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program* tanggal 4 Desember 2001, memberikan pinjaman US\$ 400 juta untuk program privatisasi BUMN di Indonesia. ADB menginginkan peningkatan partisipasi sektor swasta dalam BUMN yang mereka sebut bergerak di sektor komersial. Jadi lembaga-lembaga keuangan kapitalis, negara-negara kapitalis, dan para kapitalis kalangan investor sangat berkepentingan terhadap pelaksanaan privatisasi di Indonesia. Sebaliknya rakyat Indonesia sangat tidak berkepentingan terhadap privatisasi. Para kapitalis ini menginginkan pemerintah Indonesia membuka ladang penjarahan bagi mereka. Mereka sebenarnya tidak mengharapkan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan

rakyat Indonesia, tapi yang mereka inginkan adalah merampok kekayaan Indonesia.

D. Rumusan Masalah

”Bagaimana Dampak Neoliberalisme Terhadap Privatisasi BUMN di Indonesia Era Reformasi?”

E. Kerangka Dasar Pemikiran

1. Imperialisme Perspektif K. Kautsky

Imperialisme secara umum dapat didefinisikan sebagai bentuk penjajahan baru terhadap negara berkembang. Fase peralihan setelah berakhirnya kolonialisme, bentuk penjajahan tidak bersifat fisik lagi, tetapi lebih diciptakan pada invasi ekonomi di negara berkembang.

Imperialisme menurut Kautsky adalah sebuah produk kapitalisme industri yang sangat maju. Yang menjadi cirinya adalah upaya dari setiap negara kapitalisme industri untuk menguasai atau menganeksasi kawasan agraris tidak peduli bangsa mana yang menghuninya”.¹⁵

Dari pernyataan Kautsky diatas maka dapat dipahami, bahwa dalam rangka memasarkan produk-produk manufakturnya, maka kapitalisme harus melakukan perniaga kenegara-negara dunia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Adapun persaingan antar kapitalisme menjadi dasar dan fondasi bergeraknya arus modal kapitalisme tetap hidup walaupun ditempuh dengan berbagai cara.

¹⁵ C. Wright Miils, *Ide-Ide Dasar dan Sejarah Perkembangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 209

Imperialisme baru tidak sama dengan imperialisme lama. *Pertama*, ia mengganti ambisi dari satu kerajaan yang sedang tumbuh dengan teori dan praktek sejumlah kerajaan yang sedang bersaing, yang masing-masing dimotivasi oleh kepentingan untuk memperkuat posisi politik dan memperoleh keuntungan perdagangan. *Kedua*, dalam hal dominasi finansial atau kepentingan perdagangan.

Dalam kasus Indonesia bentuk imperialisme neoliberalisme nampak dengan hadirnya beberapa kebijakan yang pro terhadap pasar dan pemodal asing seperti pengurangan tarif impor, UUPMA No. 1 Th 1967, Implikasi undang-undang ini langsung terasa, undangan Soeharto terhadap pihak asing langsung bersambut dengan kedatangan utang luar negeri. Inter Governmental Group On Indonesia (IGGI) langsung memberi dana sebesar \$ 161 juta pada tahun pertama meningkat menjadi \$ 361 juta pada tahun kedua dan \$ 506 juta pada tahun ketiga. Disusul dengan utang dari Amerika sebesar \$ 8,2 juta dan Jepang sebesar \$ 30,6 juta pada tahun 1967. Dan sebanyak \$ 150 miliar utang Indonesia yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia sebelum krisis ekonomi 1997.¹⁶ Konsekwensi logis dari hutang luar negeri Indonesia adalah berkurangnya anggaran yang mengakibatkan minimnya dana pemulihan ekonomi sehingga mengakibatkan dicabutnya subsidi untuk rakyat.

Seperti Kautsky lebih melihat imperialisme muncul sebagai keinginan negara imperialis untuk menguasai atau menganeksasi kawasan agraris. Upaya menganeksasi "kawasan agraris" dalam pemahaman Kautsky adalah upaya negara imperialis untuk menguasai kawasan agraris (bukan karena negara imperialis),

¹⁶ Makalah Sritua Arief, *Bank Dunia dan Rakyat Indonesia*.

tanpa mempertimbangkan pembagian daerah koloni tersebut. Sehingga lambat laun menurutnya akan mengakibatkan kontradiksi internal antar negara-negara imperialis.

Berangkat dari pemaparan diatas maka dapat di pahami bahwa, sebenarnya semangat imperialisme merupakan keinginan negara imperialis melakukan invasi perluasan kawasan koloni dan mendapatkan keuntungan capital yang lebih besar. Ada beberapa yang dapat disimpulkan bahwa ada lima ciri dasar imperialisme, sebagai berikut:¹⁷

- a. Pemusatan produksi dan modal yang berkembang ketahapan yang sedemikian tinggi sehingga menciptakan monopoli yang memainkan peran penting dalam ekonomi.
- b. Bergabungnya modal bank dan modal industri, dan diciptakannya oligarki finansial, yang berbasiskan model finansial.
- c. Ekspor modal yang menjadi lebih penting dibanding ekspor komoditas.
- d. Pembentukan monopoli kapitalis internasional yang membagi-bagi wilayah dunia untuk mereka sendiri.
- e. Telah dilakukannya pembagian wilayah dunia bagi kalangan penguasa kapitalis.

2. Konsep Privatisasi

Pembangunan merupakan wacana yang penuh perdebatan, “question of development”, begitu Anna K. Dickson (1997) menyebutnya¹⁸. Dalam perkembangannya, praktik-praktik pembangunan memunculkan banyak kritik.

¹⁷ Ibid, hal. 208

¹⁸ Anna K. Dickson, *Development and International Relations: A Critical Introduction*, (Cambridge: Polity Press, 1997), hal. 3

Saat ini, dalam sebuah era mutakhir “pembangunanisme”, pembangunan menjadi suatu hal yang bersifat paradoks ketika melihat kesenjangan antara negara Dunia Ketiga dengan negara maju atau yang dikonstruksikan sebagai Barat. Dalam wacananya sebagai bagian dari wacana pembangunan yang mengemuka di abad 21 ini, privatisasi menimbulkan banyak kontroversi. Di kota Cochabamba, Bolivia, terjadi pergolakan menentang privatisasi air setelah perusahaan multinasional Bechtel dari Amerika Serikat mengambil alih sistem air di Cochabamba. Di Afrika Selatan, protes serupa juga dijalankan akibat penguasaan air oleh perusahaan multinasional asal Prancis, Suez Lyonnaise Des Eaux¹⁹. Oleh karena itu, Rita Abrahamsen menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya telah gagal, terutama dalam menghapus kemiskinan yang sangat luas, tapi teori pembangunan juga dianggap telah menemui kemacetan, terjebak dalam metanarasinya sendiri dan gagal memahami perbedaan-perbedaan di Dunia Ketiga dengan cara yang konstruktif dan relevan²⁰.

Dewasa ini, privatisasi merupakan sebuah konsep yang sangat menantang. Pemikiran mengenai privatisasi ini, mengutip Edward Said, bukanlah sebuah konsep yang tiba-tiba ada; melainkan sebuah pemikiran yang semula lahir di masa pemerintahan Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher, yang kemudian diadopsi oleh lembaga keuangan global. Pada akhirnya, di awal dekade 1990-an lahirlah *Washington Consensus* yang merupakan paket-paket kebijakan ekonomi dan pembangunan paling mutakhir dari Bank Dunia dan IMF.

¹⁹ <http://www.citizen.org/documents/privatizationfiascos.pdf>.

²⁰ Rita Abrahamsen, *Disciplining Democracy: Good Government and Development Discourse in Africa*. (New York: Zed Books, 1999), hal. 1

Dengan menggunakan analisis Michel Foucault mengenai relasi antara kekuasaan dan pengetahuan, tulisan ini hendak menunjukkan bahwa pengetahuan yang berkembang melalui wacana-wacana ekonomi dan pembangunan dewasa ini bukanlah sebuah konsep yang bebas nilai. Pemikiran privatisasi yang terkandung dalam *Washington Consensus* hanyalah salah satu metode yang digunakan oleh Barat untuk melanggengkan kekuasaannya.

Privatisasi diterapkan sebagai instrumen kebijakan perekonomian sejak tahun 1979 ketika PM Margareth Thatcher mulai menerapkan paham neoliberal dalam praktik perekonomian Inggris. Hal serupa juga dilakukan Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, dalam periode yang hampir bersamaan. Perkembangan ini kemudian memunculkan istilah “Reaganomics” dan “Thatcherism” berkenaan dengan kesamaan pola kebijakan di kedua negara tersebut yang berdasar pada paham neoliberal. Berbeda dengan pandangan penganut Keynesian yang menekankan pentingnya peran negara dalam ekonomi makro, paham neoliberal yang merupakan akar ideologi dari diterapkannya pelaksanaan privatisasi ini berasumsi bahwa keterlibatan entitas negara dalam aktivitas perekonomian dapat menimbulkan distorsi terhadap pasar²¹. Berangkat dari asumsi ini, kontrol negara terhadap kinerja pasar domestik perlu dieliminasi secara menyeluruh. Minimalisasi peran negara dalam ekonomi yang dilakukan Thatcher, salah satunya terrefleksi dari diterapkannya kebijakan privatisasi perusahaan milik negara. Ketika direalisasikan, kebijakan ini dipandang berhasil diimplementasikan

²¹ I. Wibowo dan Francis Wahono, *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Cindelaras, 2003, hal. 275

²¹ Bonnie Setiawan, *Menggugat Globalisasi*, (Jakarta: INFID, 2000), hal. 8-9

di Inggris. Kesuksesan ini menjadi titik tolak diadopsi dan diterapkannya paham neoliberal sebagai pedoman kebijakan di negara-negara kapitalis tahun 1970-an.

Dalam tahap perkembangannya, khususnya tahun 1980-an, bersamaan dengan krisis utang negara berkembang, neoliberal juga digunakan sebagai paradigma yang mendasari formulasi kebijakan badan-badan multilateral dunia seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan World Trade Organization (WTO). Adapun ide dasar yang dikembangkan oleh badan-badan multilateral dunia tersebut yaitu²²: Pertama, diterapkannya pelaksanaan privatisasi dengan alasan efisiensi. Kedua, pemotongan seluruh pengeluaran publik khususnya anggaran yang dialokasikan bagi pelayanan sosial. Ketiga, deregulasi, dengan menghapus peraturan pemerintah yang dapat menghambat aktivitas pasar. Keempat, menerapkan aturan pasar dengan membebaskan swasta dari keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Kelima, menghapus konsep barang publik dengan mengalihkan fungsi tanggung jawab tersebut kepada pasar.

Paham neoliberal ini menguat dengan dirumuskannya Washington Consensus untuk mengatasi krisis ekonomi di negara berkembang oleh IMF²³. Washington Consensus muncul sebagai “kesepakatan” lembaga Bretton Woods, terutama IMF dan World Bank, dalam mengatasi problem pembangunan di berbagai negara dengan penekanan pada kebijakan pasar bebas, perdagangan bebas dan pengurangan peran sentral negara di sektor ekonomi dengan tujuan mengintegrasikan ekonomi domestik negara tersebut ke dalam sistem ekonomi global. Sepanjang tahun 1980-1990-an, Washington Consensus yang

²³ Yujiro Hayami, “From Washington Consensus to Post Washington Consensus: Retrospect and Prospect”, dalam *Asian Development Review*, Vol. 20, No. 2, Tahun 2003, hal. 55

diimplementasikan melalui kebijakan *Structural Adjustment Program* (SAP) sangat dominan berkaitan dengan sumbangannya terhadap kebijakan pembangunan. Ada sepuluh gagasan utama dari paham ini di mana privatisasi, liberalisasi dan disiplin fiskal merupakan pilar utama untuk mendukung terlaksananya fungsi pasar secara efektif²⁴. Berikut adalah fitur-fitur mendasar dari Washington Consensus menurut John Williamson²⁵: (1) Disiplin di bidang fiskal. (2) Mengurangi segala alokasi dana pemerintah untuk publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur; dan dialihkan ke sektor yang lebih berorientasi profit. (3) Reformasi perpajakan. (4) Liberalisasi nilai suku bunga. (5) Penerapan nilai tukar yang kompetitif. (6) Liberalisasi perdagangan. (7) Liberalisasi PMA. (8) Privatisasi. (9) Deregulasi. (10) Jaminan kepemilikan publik.

Menurut Stephen Green (2003), privatisasi adalah praktik transfer hak kepemilikan dari negara kepada sektor swasta untuk mencapai beberapa tujuan seperti²⁶: *Pertama*, meningkatkan efisiensi perusahaan. *Kedua*, menstimulasi akses terhadap pasar. *Ketiga*, meminimalisir pelaksanaan korupsi dalam tata kelola perusahaan. *Keempat*, mengembalikan aset-aset negara yang disalahgunakan oleh oknum pejabat negara ketika mengelola aset tersebut. Melengkapi argumen Green, terdapat enam alasan yang dikemukakan kaum neoliberal terhadap dilangsungkannya privatisasi²⁷. *Pertama*, mengurangi beban keuangan pemerintah. *Kedua*, meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan.

²⁴ *Ibid.* 57

²⁵ John Wiliamson, "What Should the World Bank Think about the Washington Consensus?"

²⁶ Stephen Green, "Privatization in The Former Soviet Bloc: Any Lesson for China?", *The Royal Institute of International Affairs Asia Program Working Paper*, No. 10, November 2003.

²⁷ http://www.pacific.net.id/pakar/setyanto/tulisan_02.tml

Ketiga, meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan. *Keempat*, mengurangi campur tangan birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan. *Kelima*, mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri. *Keenam*, sebagai *flag-carrier* (pembawa bendera) untuk *go international*.

Privatisasi merupakan salah satu “poin wajib” dari Washington Consensus, yang lebih menekankan pada peran penting sektor swasta dalam pengelolaan perekonomian, dan merupakan salah satu strategi pembangunan dan restrukturisasi ekonomi. Tren yang berkembang kemudian menunjukkan bahwa privatisasi merupakan keniscayaan yang selalu hadir dalam restrukturisasi ekonomi bersamaan dengan dikucurkannya paket bantuan internasional. Alasan fundamental perlunya kebijakan privatisasi adalah karena pengelolaan oleh sektor swasta memungkinkan efisiensi alokasi sumber daya guna maksimalisasi *profit*, dibandingkan pemerintah yang dalam tiap tindakannya cenderung diwarnai motif kepentingan politik dan hal lainnya yang dinilai tidak efisien.

Di Indonesia, privatisasi sudah dimulai di masa pemerintahan Orde Baru, akhir 1980-an. Privatisasi dimulai dengan memprivatisasi PT Telkom Indonesia, yang kemudian menjadi lebih masif ketika IMF masuk ke Indonesia tahun 1998. Di berbagai *Letter of Intent* Indonesia dengan IMF, pemerintah diinstruksikan untuk memprivatisasi beberapa BUMN²⁸. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia di tahun 1997 mendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi karena minimnya anggaran yang tersedia untuk menyediakan layanan publik. Proses

²⁸ http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002_0506/11.html.

pengalihan kepemilikan ini menjadi semacam “simple way out” bagi solusi krisis, padahal mempunyai dampak jangka panjang.

F. Hipotesa

Dari penelaan terhadap Privatisasi BUMN yang diakibatkan oleh Neoliberalisme dengan memakai perspektif Imperialisme dan Makna Privatisasi secara Teoritis, maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut: *Pertama*, Neoliberalisme melalui IMF, WORLD BANK, WTO, dan TNC menciptakan dominasi terhadap kebijakan Indonesia di sektor publik sehingga berorientasi pada pasar bebas. *Kedua*, gagasan neoliberalisme yang mengisyaratkan peran pasar dalam relasi masyarakat dunia internasional, sehingga negara kehilangan peranannya dalam kebijakan Publick.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu. Sedangkan ciri-ciri metode deskriptif adalah:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian di analisa.

Penelitian sejarah di bagi dalam empat tahap yang harus dilalui secara runtut dan sistematis. Keempat tahap tersebut adalah heuristik, kritik, interpretasi,

dan historiografi.²⁹ *Heuristik* adalah tahap pengumpulan sumber atau fakta sejarah yang mendukung tema penulisan. Referensi yang dipakai adalah sumber sekunder. *Kritik* adalah tahap penelitian untuk memilah sumber-sumber sejarah yang dapat dijadikan referensi dan yang yang tidak dapat di gunakan. *Interpretasi* adalah pembacaan secara jernih dan objektif terhadap data yang ada dengan menggunakan pendekatan dan kerangka teori yang telah ada. *Historiografi* yaitu menulis sejarah secara deskriptif-analitis. Deskriptif analitis adalah bentuk pemaparan sejarah dengan ragam bahasa ilmiah yang berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dan dianalisa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan referensi yang diperoleh melalui studi pustaka. Adapun sumber data tersebut meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dari internet yang sesuai dengan masalah yang dikaji. Data-data yang didapatkan akan dianalisa secara sistematis mendalam, kemudian akan diambil kesimpulan dari data-data tersebut dan dijadikan referensi atau acuan sebagai sebuah fakta pendukung untuk mendukung dan membuktikan kerangka masalah yang diteliti penulis.

3. Jenis Data

Penelitian ini akan memakai data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder adalah jenis data yang mengutip dari sumber lain. Maka, sumber data ini

²⁹ Zainul Munasichin, *Berebut Kiri*, Yogyakarta, 2005, LKiS, hal. 20

bisa berupa tulisan, baik berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan dari internet yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

4. Teknik Analisa Data

Tujuan dari analisa data adalah bagaimana menyederhanakan data-data penelitian dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Oleh karena itu model penelitian ini menggunakan model analisa kualitatif, yakni teknik yang mendasarkan pada data kualitatif atau data yang merupakan wujud dari kata-kata tertulis menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁰ Teknik kualitatif terdiri dari tiga alur, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³¹ Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis. Reduksi data diajukan guna memungkinkan penghapusan atau penghilangan data yang tidak relevan dalam setiap tahap penelitian. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menyesuaikan data-data yang ada dengan teknik analisa yang akan digunakan.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam rangka untuk menentukan unitasi dan tekni pencatatan secara lebih detail, terutama tentang bahasa data dan makna data yang akan dibahas lebih dalam pengumpulan data.

Kegiatan analisa ketiga yang sangat penting adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan seorang peneliti sudah mulai mencatat keteraturan,

³⁰ Lih. Lexi. J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung:: PT Remaja Rosdakarya, 1994, hal. 3

³¹ Lih. Mathew B. Milles, at.al. *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press:, 1992, hal. 52

pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan tidak skeptis, tetapi kesimpulannya sudah disediakan, mula-mula belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Penarikan kesimpulan hanyalah merupakan sebagian kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memperoleh gambaran yang umum dan terpadu. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini, akan membahas tentang; *Alasan Pemilihan Judul, Tujuan, Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian.*

BAB II : Perkembangan Kapitalisme Global dan Gagasan Neoliberalisme

Pada bab ini akan menggambarkan perkembangan kapitalisme global mulai dari awal, klasik dan paska lanjut. Karena dalam perkembangannya, watak kapitalisme selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan perkembangan model produksi dan hubungan produksi manusia. Sehingga dalam bab ini akan memberikan gambaran bentuk eksploitasi secara global dan menjelaskan beberapa unsur neoliberalisme yang ditandai dengan munculnya revolusi industri, berdirinya perusahaan-perusahaan bertaraf internasional (TNCs dan MNCs) dan

lembaga-lembaga donatur yang berlangsungnya keterbelakangan negara dunia ketiga

BAB III : Relasi Neoliberalisme Terhadap Privatisasi BUMN di Indonesia

Setelah mengetahui sejarah perkembangan dan gagasan Neoliberalisme, maka dalam bab ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada peran-relasi Neoliberalisme dalam mendorong privatisasi BUMN di Indonesia. Serta sedikit menggambarkan dampak-dampak sosial yang diakibatkan dari privatisasi BUMN terhadap sektor publik.

BAB IV : Privatisasi BUMN dan Hilangnya Campur Tangan Negara Dalam Sektor Publick

Dalam BAB ke IV, akan lebih banyak menyinggung tentang Privatisasi BUMN di Indonesia sebagai perwujudan hilangnya campur tangan negara dalam sektor Publick seperti Pendidikan, Pertanian, Kedokteran dsb.

BAB V : Penutup

Pada bab tersebut adalah memberikan kesimpulan sementara dari pembahasan keseluruhan bab dalam skripsi ini, sekaligus memberikan kritik terhadap kebijakan yang berkiblat kepada kemilik modal.